

Tantangan Kultural dan Struktural terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan: Studi Literatur tentang Fenomena Glass Ceiling dalam Partai Politik

Ekaristi Panulu Manik¹, I Ketut Putra Erawan², Gede Indra Pramana³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

panulu.manik013@student.unud.ac.id, ketut.erawan@ipd.or.id, indrprama@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan politik tertinggi di Indonesia, dengan fokus pada fenomena langit-langit kaca (glass ceiling) di dalam partai politik. Meskipun kebijakan afirmasi kuota 30% telah berlaku selama dua dekade, representasi perempuan di level strategis tetap stagnan, mengindikasikan adanya hambatan yang lebih dalam dan sistemik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menjawab rumusan masalah: Bagaimana faktor-faktor kultural dan struktural di dalam partai politik menciptakan fenomena glass ceiling yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi? Hasil analisis menunjukkan bahwa glass ceiling bukanlah sekadar hambatan tunggal, melainkan sebuah sistem kompleks yang terbentuk dari interaksi toksik antara faktor kultural dan struktural. Faktor kultural yang dominan adalah ideologi patriarki yang termanifestasi dalam stereotip gender, persepsi kompetensi yang rendah, dan beban ganda yang dibebankan pada perempuan. Faktor-

faktor ini diperkuat oleh hambatan struktural di dalam partai politik, seperti praktik rekrutmen dan kaderisasi yang bersifat tokenistik, penempatan perempuan pada nomor urut caleg yang tidak strategis, serta budaya organisasi maskulin yang eksklusif. Di tingkat eksternal, arena kompetisi yang timpang akibat politik berbiaya tinggi, pembungkaman media yang bias, dan maraknya kekerasan politik berbasis gender semakin memperkokoh halangan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan struktural seperti kuota tidak akan efektif tanpa adanya transformasi kultural yang fundamental di dalam partai politik dan masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi diarahkan pada reformasi internal partai yang komprehensif, penguatan regulasi pemilu yang mencakup pendanaan afirmatif, serta upaya kolektif dari masyarakat sipil dan media untuk mengubah narasi tentang kepemimpinan perempuan.

Kata Kunci: Kepemimpinan Politik Perempuan; Langit-langit Kaca (Glass Ceiling); Partai Politik; Budaya Patriarki

ABSTRACT

This study examines the challenges faced by women in achieving the highest political leadership positions in Indonesia, with a focus on the glass ceiling phenomenon (glass ceiling) within political parties. Although the 30% affirmative action quota policy has been in effect for two decades, women's representation at the strategic level remains stagnant, indicating deeper and systemic barriers. Using a qualitative research method through a literature study approach, this study answers the problem formulation: How do cultural and structural factors within political parties create this phenomenon? Glass ceilings that hinder women from reaching the highest leadership positions? The results of the analysis show that the glass ceiling is not a single obstacle, but rather a complex system formed from the toxic interaction of cultural and structural factors. The dominant cultural factor is patriarchal ideology, manifested in gender stereotypes, low

*Corresponding author

E-mail addresses: panulu.manik013@student.unud.ac.id

perceptions of competence, and the double burden placed on women. These factors are reinforced by structural barriers within political parties, such as recruitment and cadre development practices that are inherently biased. from tokenism, the placement of women in non-strategic legislative candidate lists, and an exclusive, masculine organizational culture. Externally, the unequal competitive landscape resulting from high-cost politics, biased media framing, and the prevalence of gender-based political violence further reinforce these barriers. This study concludes that structural policies such as quotas will be ineffective without fundamental cultural transformation within political parties and society. Therefore, recommendations are directed at comprehensive internal party reform, strengthening election regulations that include affirmative action funding, and collective efforts by civil society and the media to change the narrative about women's leadership.

Keywords: Women's Political Leadership; Glass Ceiling; Political Parties; Patriarchal Culture

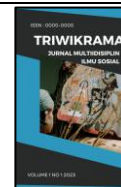
1. PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan politik merupakan salah satu tolok ukur fundamental bagi kesehatan demokrasi dan pencapaian kesetaraan gender. Namun, data global secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan masih sangat terpinggirkan di semua level kekuasaan. Laporan bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women menunjukkan bahwa per 1 Januari 2025, perempuan hanya menjabat sebagai Kepala Negara dan/atau Pemerintahan di 25 negara (UN Women, 2025). Secara global, perempuan hanya mengisi 27,2% kursi parlemen nasional dan 22,9% posisi menteri kabinet (UN Women, 2025). Data ini menegaskan bahwa paritas gender dalam kehidupan politik masih merupakan tujuan yang jauh, dengan laju kemajuan yang lambat (UN Women, 2025). Lebih jauh, data tersebut juga mengungkap adanya segregasi gender dalam pembagian kekuasaan, di mana laki-laki mendominasi portofolio kebijakan strategis seperti ekonomi, pertahanan, dan luar negeri, sementara perempuan lebih banyak memimpin kementerian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial (UN Women, 2025).

Dalam konteks Indonesia, lanskap politik perempuan menghadirkan sebuah paradoks yang signifikan. Di satu sisi, Indonesia telah mengadopsi kebijakan afirmasi berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif sejak Pemilu 2004, sebuah kebijakan yang diatur dalam berbagai undang-undang pemilu dan partai politik (Wahid & Tifu, 2023). Namun, disisi lain, hasil elektoral secara konsisten gagal mencapai target tersebut. Angka keterpilihan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan stagnasi yang mengkhawatirkan. Pada Pemilu 2019, keterpilihan perempuan tercatat sebesar 19,48% (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019) atau 20,5% menurut sumber lain (Putri & Prahassacitta, 2020), dan hanya mengalami peningkatan marjinal menjadi 21,9% (127 dari 580 total kursi) pada Pemilu 2024 (TVR Parlemen, 2024). Stagnasi ini mengisyaratkan adanya persoalan yang lebih mendasar dan sistemik, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemenuhan kuota di tingkat pencalonan (Hasan & Ilyas, 2023).

Tabel 1 Perbandingan Tingkat Representasi Politik Perempuan: Global, Regional, dan Nasional (2024-2025)

Indikator	Tingkat Representasi
Global	
Rata-rata Anggota Parlemen	27.2% (per Jan 2025)
Rata-rata Menteri Kabinet	22.9% (per Jan 2025)
Regional (Sebagai Perbandingan)	
Filipina (Parlemen 2019)	27.96%



Nasional (Indonesia)	
DPR RI (Hasil Pemilu 2019)	19.48% / 20.5%
DPR RI (Hasil Pemilu 2024)	21.9%

Sumber: Dikelola dari Berbagai Sumber oleh Peneliti, 2025

Tabel 1 secara gamblang menunjukkan bahwa capaian Indonesia tidak hanya berada di bawah rata-rata global, tetapi juga tertinggal dari negara tetangga di kawasan seperti Filipina, yang memiliki sistem demokrasi serupa (Faoziyah, 2022). Kesenjangan antara target kuota 30% dan realitas keterpilihan yang berkisar di angka 21-22% menjadi ruang analisis krusial. Hal ini menunjukkan bahwa masalah telah bergeser dari sekadar *nominasi* (terdaftar sebagai calon) menjadi masalah *eleksi* (memenangkan kursi) dan *asensi* (naik ke posisi kepemimpinan). Peningkatan yang sangat tipis selama lima tahun, meskipun diwarnai dengan aktivitas dan belanja politik yang masif, bukanlah tanda kemajuan, melainkan gejala inersia sistemik. Kebijakan yang ada tampaknya telah mencapai batas efektivitasnya dan kini lebih berfungsi untuk mempertahankan status quo daripada mendorong perubahan lebih lanjut.

Untuk memahami paradoks ini, penelitian ini menggunakan konsep langit-langit kaca (*glass ceiling*) sebagai kerangka analisis utama. Istilah ini merujuk pada serangkaian hambatan tak kasat mata (*invisible barriers*) yang bersifat sistemik dan tertanam dalam institusi politik serta budaya masyarakat, yang secara efektif menghalangi perempuan untuk mendaki jenjang karir menuju puncak kepemimpinan (Fitriani & Sudaryono, 2023). Fenomena ini menjelaskan mengapa, meskipun pintu masuk formal telah dibuka melalui kebijakan kuota, perempuan tetap kesulitan menembus eselon tertinggi kekuasaan politik (Dewi, 2014).

Penelitian ini menjadi urgen karena rendahnya representasi perempuan bukanlah sekadar isu statistik. Hal ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi, keragaman agenda kebijakan (karena perempuan terbukti sering memperjuangkan prioritas kebijakan yang berbeda, terutama yang menyangkut isu perempuan, anak, dan kesejahteraan sosial) (UN Women, 2025), serta upaya pemberantasan korupsi (Hidayah & Suhardi, 2023). Kegagalan partai politik untuk membongkar *glass ceiling* ini merupakan indikasi dari kegagalan proses pematangan demokrasi dan institusionalisasi partai itu sendiri (Manan & Syafariah, 2021).

Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menciptakan dan melanggengkan *glass ceiling* di dalam partai politik Indonesia menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan sentral berikut: Bagaimana faktor-faktor kultural dan struktural di dalam partai politik menciptakan fenomena glass ceiling yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi?

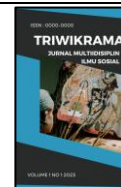
TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Glass Ceiling dalam Konteks Organisasi Politik

Istilah *glass ceiling* atau langit-langit kaca pertama kali populer di dunia korporat untuk menggambarkan serangkaian hambatan artifisial yang tidak terlihat, yang menghalangi individu-individu berkualifikasi khususnya perempuan dan kelompok minoritas untuk maju ke posisi manajemen senior dan eksekutif (Fitriani & Sudaryono, 2023). Metafora kaca digunakan karena hambatan ini bersifat transparan; tidak ada hukum atau aturan organisasi formal yang melarang kemajuan perempuan, namun keberadaannya dapat dirasakan dan secara sistematis menghambat

*Corresponding author

E-mail addresses: panulu.manik013@student.unud.ac.id



pengembangan karier mereka (Dewi, 2014). Fenomena ini berjalan secara sistemik, seringkali dalam bentuk diskriminasi dan penindasan gender yang tidak disadari atau tidak diakui (Dewi, 2014).

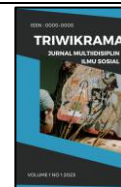
Meskipun berasal dari sektor swasta, konsep ini sangat relevan dan dapat diaplikasikan untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam organisasi politik seperti partai politik (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, 2023). Dalam konteks politik, *glass ceiling* termanifestasi sebagai rintangan yang mencegah politisi perempuan untuk mencapai posisi-posisi puncak seperti ketua umum partai, ketua fraksi di parlemen, ketua komisi strategis (misalnya, anggaran atau pertahanan), menteri di portofolio kunci, atau dicalonkan sebagai kandidat presiden atau wakil presiden (Fitriani & Sudaryono, 2023). Hambatan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kualifikasi atau ambisi, melainkan oleh struktur dan kultur yang dikonstruksi oleh masyarakat dan institusi yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik (Wahyuni, 2022). Konsep ini juga dapat diperluas untuk mencakup hambatan berlapis yang dihadapi oleh perempuan dari kelompok minoritas, yang terkadang disebut sebagai langit-langit bambu (*bamboo ceiling*) (Maheshwari & Lenka, 2022).

Representasi Politik Perempuan: Perspektif Teoretis

Untuk membingkai analisis mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan, dua kerangka teoritis utama digunakan: teori representasi politik Hanna Pitkin dan *Politics of Presence* dari Anne Phillips. Hanna Pitkin (1967) dalam karyanya yang monumental, *The Concept of Representation*, mengidentifikasi empat dimensi representasi yang saling terkait, yang memberikan kerangka kerja komprehensif untuk mengevaluasi keterwakilan politik (Faoziyah, 2022):

- 1) Representasi Formal (*Formal Representation*): Merujuk pada mekanisme dan aturan formal yang melegitimasi seorang wakil, seperti proses pemilihan umum dan kerangka hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, ini mencakup undang-undang pemilu yang mengamankan kuota 30% (Wahid & Tifu, 2023).
- 2) Representasi Deskriptif (*Descriptive Representation*): Menekankan sejauh mana sebuah lembaga perwakilan mencerminkan komposisi demografis masyarakat yang diwakilinya. Gagasan ini sering disebut sebagai politik kehadiran (*politics of presence*), di mana parlemen idealnya adalah potret miniatur dari bangsa. Angka keterwakilan perempuan di Indonesia yang hanya 21,9% (Cakra Wikara Indonesia, 2024) menunjukkan kegagalan yang nyata dalam mencapai representasi deskriptif.
- 3) Representasi Substantif (*Substantive Representation*): Fokus pada tindakan seorang wakil dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya (*acting for*). Dimensi ini mempertanyakan apakah kehadiran perempuan di parlemen secara otomatis berujung pada lahirnya kebijakan yang pro-perempuan dan berkeadilan gender. Beberapa studi menunjukkan bahwa dampak substantif ini belum terlalu terlihat, salah satunya karena politisi perempuan belum banyak menempati posisi kepemimpinan strategis (Umagapi, 2020).
- 4) Representasi Simbolis (*Symbolic Representation*): Berkaitan dengan makna dan persepsi seorang wakil di mata mereka yang diwakili. Kehadiran pemimpin perempuan dapat menjadi simbol yang kuat, menginspirasi perempuan lain untuk berpartisipasi dalam politik dan menantang norma-norma tradisional tentang kepemimpinan (Wahid & Tifu, 2023).

Melengkapi Pitkin, Anne Phillips (1995) dalam *The Politics of Presence* secara khusus memperkuat argumen untuk representasi deskriptif (Setyowati & Haryono, 2022). Phillips berpendapat bahwa kehadiran fisik perempuan (dan kelompok terpinggirkan lainnya) di arena politik sangat krusial. Ini bukan hanya soal keadilan numerik, tetapi karena mereka membawa pengalaman hidup, perspektif, dan prioritas yang berbeda, yang selama ini absen dari diskursus



politik yang didominasi laki-laki. Kehadiran mereka dapat mengubah agenda politik, menantang asumsi-asumsi yang bias gender, dan memastikan bahwa kepentingan dan kekhawatiran perempuan tidak lagi diabaikan atau disalahartikan.

Budaya Patriarki sebagai Kerangka Analisis Kultural

Faktor kultural yang paling fundamental dalam menghambat kemajuan politik perempuan adalah budaya patriarki. Patriarki didefinisikan sebagai sebuah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti (Wahid & Tifu, 2023). Dalam sistem ini, peran laki-laki diposisikan sebagai sentral dan superior, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat (Shakinah & Sumampouw, 2023). Dalam konteks politik Indonesia, budaya patriarki ini termanifestasi dalam berbagai bentuk yang saling terkait:

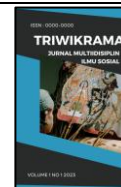
- 1) **Pembagian Peran Gender Tradisional:** Patriarki mengkonstruksi pembagian kerja yang kaku, menempatkan perempuan dalam ranah domestik (mengurus rumah tangga dan anak) dan laki-laki di ranah publik (politik dan ekonomi) (Putri & Prahassacitta, 2020). Stigma kultural seperti istilah Jawa *konco wingkin* (teman di belakang) secara eksplisit mereduksi peran perempuan sebagai pendamping di ranah privat, bukan sebagai pemimpin di ranah publik (Putri & Prahassacitta, 2020).
- 2) **Stereotip Gender yang Merendahkan:** Budaya ini melahirkan stereotip yang merugikan, yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang emosional, tidak rasional, lemah, dan tidak cakap untuk menghadapi dunia politik yang keras (Wahyuni, 2013). Akibatnya, kemampuan kepemimpinan perempuan sering kali diragukan, dan mereka dianggap tidak cocok untuk memegang jabatan strategis (Putri & Prahassacitta, 2020).
- 3) **Marginalisasi dan Subordinasi:** Di arena politik, pandangan patriarkal ini mendorong marginalisasi perempuan ke portofolio atau komisi yang dianggap feminin atau lunak seperti kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan (UN Women, 2025). Ini adalah bentuk subordinasi yang secara efektif menjauhkan perempuan dari pusat-pusat kekuasaan di bidang ekonomi, anggaran, dan pertahanan, yang pada akhirnya memperkuat *glass ceiling*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam kompleksitas fenomena sosial yang dikaji (Lulu, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali makna, konteks, dan proses di balik angka statistik keterwakilan perempuan, yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh metode kuantitatif.

Metode spesifik yang digunakan adalah studi literatur (studi kepustakaan) (Faoziyah, 2022). Metode ini melibatkan pengumpulan, identifikasi, evaluasi, dan sintesis data secara sistematis dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan penelitian ini berfokus pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan referensi dan hasil riset sebelumnya untuk membangun argumen baru dan pemahaman yang lebih dalam (Fitriani & Sudaryono, 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai dokumen. Sumber-sumber tersebut meliputi:

- 1) **Laporan Institusi Internasional:** Publikasi dari UN Women dan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang menyediakan data global dan analisis tren keterwakilan politik perempuan (UN Women, 2025).



- 2) Laporan Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional: Data dan laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta analisis dari organisasi masyarakat sipil seperti Cakra Wikara Indonesia (CWI) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) (TVR Parlemen, 2024).
- 3) Jurnal Akademik Peer-Reviewed: Artikel ilmiah dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan oleh universitas dan lembaga penelitian, yang membahas topik-topik seperti *glass ceiling*, budaya patriarki, partai politik, dan partisipasi politik perempuan di Indonesia (Putri & Prahassacitta, 2020).
- 4) Analisis Media dan Dokumen Lainnya: Artikel berita, opini ahli, dan dokumen kebijakan yang relevan untuk memahami pembingkai media dan wacana publik seputar politisi perempuan (Hidayah & Suhardi, 2023).

Teknik analisis data yang diterapkan adalah sintesis tematik. Proses ini melibatkan beberapa langkah: (1) pengumpulan data dari seluruh sumber yang teridentifikasi; (2) pembacaan dan pengkodean data untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berulang; (3) pengkategorian kode-kode tersebut ke dalam tema-tema utama yang sesuai dengan kerangka penelitian, yaitu hambatan kultural dan hambatan struktural; (4) sintesis temuan dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen yang koheren, kritis, dan komprehensif yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

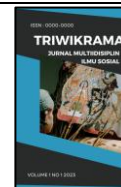
HASIL

Analisis mendalam terhadap literatur yang tersedia mengungkap bahwa fenomena *glass ceiling* dalam partai politik di Indonesia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara hambatan kultural yang mengakar dan hambatan struktural yang melembaga. Tulisan ini akan membedah faktor-faktor tersebut secara terperinci, menunjukkan bagaimana keduanya saling menguatkan untuk menciptakan rintangan sistemik bagi kemajuan politisi perempuan.

Dari sisi kultural, budaya patriarki yang masih dominan sering kali menempatkan kepemimpinan sebagai domain maskulin. Perempuan dihadapkan pada ekspektasi ganda: harus berprestasi di ranah publik sambil tetap memikul tanggung jawab utama di ranah domestik. Stereotip yang melekat, seperti anggapan bahwa perempuan terlalu emosional, kurang tegas, atau tidak cukup tangguh untuk dunia politik yang keras, terus merongrong kredibilitas dan membatasi peluang mereka. Pandangan ini tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga sering kali diinternalisasi dalam dinamika internal partai, membatasi ruang gerak politisi perempuan bahkan sebelum mereka sempat membuktikan kapabilitasnya.

Hambatan kultural ini diperparah oleh faktor struktural di dalam partai politik itu sendiri. Proses rekrutmen dan kaderisasi sering kali tidak transparan dan lebih mengandalkan jaringan pertemanan lama yang didominasi laki-laki, sehingga secara inheren menutup akses bagi perempuan. Meskipun ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30% caleg perempuan, implementasinya sering bersifat formalitas. Perempuan kerap ditempatkan pada nomor urut bawah atau di daerah pemilihan yang sulit dimenangkan. Lebih krusial lagi, posisi-posisi pengambil keputusan strategis di internal partai, seperti ketua umum atau sekretaris jenderal, hampir secara eksklusif dipegang oleh laki-laki, yang secara efektif meminggirkan suara dan perspektif perempuan dari pusat kekuasaan partai.

Pada akhirnya, interaksi antara kedua hambatan ini bersifat resiprokal. Norma kultural yang bias gender melegitimasi struktur partai yang tidak setara; sebaliknya, struktur yang timpang ini terus mereproduksi dan melestarikan bias kultural tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk memecahkan *glass ceiling* ini menuntut pendekatan ganda: tidak hanya mendorong reformasi



struktural dan kebijakan afirmatif yang lebih bermakna di dalam partai, tetapi juga secara aktif membongkar stereotip dan norma budaya yang menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kepemimpinan politik nasional.

Hambatan Kultural: Dinding Patriarki dalam Budaya Politik

Hambatan kultural menjadi fondasi yang paling fundamental bagi eksistensi *glass ceiling*. Dinding patriarki ini tidak terlihat namun sangat kokoh, membentuk persepsi, norma, dan perilaku yang secara sistematis merugikan politisi perempuan. Stereotip gender seperti anggapan bahwa perempuan lebih emosional dan kurang cocok untuk kepemimpinan yang keras terus mengakar dalam alam bawah sadar kolektif, membuat kapabilitas mereka sering kali diragukan bahkan sebelum diberi kesempatan. Norma sosial juga menuntut peran ganda yang memberatkan, membatasi waktu serta energi mereka untuk berpolitik secara total. Pada akhirnya, budaya ini menciptakan lingkungan yang secara inheren meminggirkan perempuan dari pusat kekuasaan.

1) Dominasi Ideologi Patriarki dan Beban Ganda

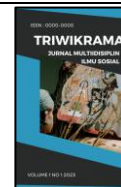
Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia secara inheren menciptakan dikotomi antara ranah publik dan domestik (Wahid & Tifu, 2023). Politik, dengan sifatnya yang kompetitif dan terbuka, dipandang sebagai domain maskulin, sementara perempuan secara tradisional ditempatkan di ranah domestik, bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Pandangan ini secara langsung mendelegitimasi kehadiran perempuan di arena politik (Usni, 2024).

Konsekuensi langsung dari ideologi ini adalah beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung oleh politisi perempuan. Mereka tidak hanya dituntut untuk berkinerja secara profesional di dunia politik yang menuntut waktu dan energi, tetapi juga tetap diharapkan untuk memenuhi peran tradisional mereka sebagai istri dan ibu di rumah (Putri & Prahassacitta, 2020). Seorang politisi perempuan dalam sebuah studi mengungkapkan bahwa hambatan utama yang ia hadapi adalah keterbatasan waktu dan pembagian peran dalam keluarga, di mana waktu bersama keluarga menjadi sangat berkurang (Putri & Prahassacitta, 2020). Beban ganda ini menjadi penghalang praktis yang signifikan, membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan partai, membangun jaringan, atau berkampanye secara intensif, sebuah kendala yang tidak dihadapi oleh rekan-rekan pria mereka dalam skala yang sama (Rastati, 2017).

2) Stereotip Gender dan Persepsi Kompetensi

Ideologi patriarki melahirkan serangkaian stereotip gender yang sangat merugikan. Perempuan sering kali distigmakan sebagai makhluk yang lebih emosional, kurang rasional, sensitif, dan tidak cukup tangguh untuk memimpin (Wahyuni, 2013). Sebuah studi bahkan mengutip hipotesis populer bahwa bos wanita sering beremosi sebagai justifikasi dangkal untuk menolak kepemimpinan perempuan (Makhbul, 2019). Stereotip ini secara langsung menyerang persepsi tentang kompetensi perempuan. Masyarakat dan bahkan elite politik masih memegang anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan di atas laki-laki, sehingga anggota dewan perempuan masih dianggap lemah (Putri & Prahassacitta, 2020).

Persepsi ini diperparah oleh cara media dan publik menilai politisi perempuan, yang sering kali lebih difokuskan pada aspek fisik dan penampilan daripada substansi gagasan atau rekam jejak politik mereka (Cahyani & Nugroho, 2023). Akibatnya, perempuan harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan kapabilitas mereka, melawan arus persepsi negatif yang terus-menerus meragukan kemampuan mereka untuk membuat keputusan sulit atau memimpin dalam situasi krisis (Rastati, 2017).



3) Resistensi Sosial dan Bias Pilih

Norma-norma kultural ini pada akhirnya bermuara pada perilaku pilih di bilik suara. Terdapat resistensi sosial yang signifikan terhadap kepemimpinan perempuan, yang sering kali tidak disadari. Salah satu buktinya adalah kecenderungan pilih untuk memilih calon legislatif (caleg) yang ditempatkan pada nomor urut strategis, seperti nomor 1 atau 2 (Kementerian Sekretariat Negara, 2022). Data Pemilu 2019 menunjukkan bahwa 48% caleg perempuan terpilih berada di nomor urut 1, dan 25% di nomor urut 2 (Kementerian Sekretariat Negara, 2022). Fenomena ini berlanjut di Pemilu 2024, di mana sekitar 64% caleg perempuan yang lolos ke Senayan berasal dari nomor urut 1 (Hasan & Ilyas, 2023). Ini menunjukkan bahwa bias pilih terhadap nomor urut kecil sangat kuat, dan ketika partai politik tidak menempatkan perempuan di posisi tersebut, peluang keterpilihan mereka menurun drastis.

Selain itu, pandangan umum bahwa politik adalah dunia laki-laki menyebabkan kurangnya dukungan maksimal bagi caleg perempuan, baik dari masyarakat luas maupun dari lingkungan terdekat seperti keluarga (Haryati dkk, 2015). Bahkan, beberapa politisi perempuan melaporkan adanya fenomena di mana perempuan tidak saling mendukung, yang semakin mempersulit perjuangan mereka (Rastati, 2017). Resistensi ini menciptakan lingkaran setan: kurangnya dukungan publik membuat partai enggan berinvestasi pada caleg perempuan, yang pada gilirannya memperkecil peluang mereka untuk terpilih dan membuktikan diri.

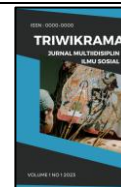
Hambatan Struktural Internal Partai Politik: Mesin Politik yang Maskulin

Jika budaya patriarki adalah pondasinya, maka struktur internal partai politik adalah mesin yang secara aktif memproduksi dan melanggengkan *glass ceiling*. Mekanisme, aturan tidak tertulis, dan budaya organisasi partai secara sistematis lebih menguntungkan laki-laki. Proses rekrutmen dan kaderisasi seringkali berjalan dalam lingkaran dalam yang eksklusif dan didominasi pria, sehingga menutup pintu bagi perempuan yang tidak memiliki koneksi serupa. Selain itu, posisi-posisi strategis yang menjadi penentu kebijakan partai jarang sekali dipercayakan kepada perempuan. Kebijakan kuota 30% pun kerap menjadi sekadar formalitas tanpa penempatan yang strategis, menegaskan bahwa struktur kekuasaan tetap kokoh di tangan laki-laki.

1) Rekrutmen dan Kaderisasi: Tokenisme vs. Komitmen

Meskipun semua partai politik peserta Pemilu 2024 memenuhi syarat pencalonan 30% perempuan (Hasan & Ilyas, 2023), analisis mendalam menunjukkan bahwa pemenuhan kuota ini sering kali bersifat formalitas belaka, sebuah praktik yang dapat digambarkan sebagai tokenisme (Primaresti, 2024). Partai politik cenderung memandang kebijakan afirmasi sebagai beban administratif yang harus dipenuhi untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu, bukan sebagai komitmen ideologis untuk mendorong kesetaraan gender (Stiftung, 2024).

Praktik ini terlihat dari proses rekrutmen dan kaderisasi yang sering kali bersifat instan dan tidak sistematis (Oktafia, 2022). Partai merekrut perempuan terkadang dengan cara asal comot (Puspitosari & Nugroho, 2023) menjelang tenggat waktu pendaftaran caleg tanpa melalui proses pendidikan politik dan pengkaderan yang matang (Anggraini, 2014). Akibatnya, banyak caleg perempuan yang tidak memiliki modal politik, sosial, dan finansial yang cukup untuk bersaing secara efektif (Oktafia, 2022). Banyak partai juga tidak memiliki program pemberdayaan kader perempuan yang terstruktur dan berkelanjutan (Putri & Prahassacitta, 2020). Hal ini berbeda dengan kader laki-laki yang sering kali telah dipersiapkan melalui jenjang karir yang lebih panjang di dalam partai. Ketiadaan komitmen pada kaderisasi ini menunjukkan bahwa kuota hanya dipahami sebatas syarat administratif, belum terinternalisasi dalam mekanisme partai (Kamu Bersih Aku Pilih, 2023).

**Tabel 2 Indeks Prestasi Keterwakilan (IPK) Perempuan per Partai Politik di DPR RI Hasil Pemilu 2024**

Partai Politik	Total Kursi	Kursi Perempuan	IPK Perempuan (%)
Partai NasDem	69	20	28.99%
PDI Perjuangan (PDIP)	110	27	24.55%
Partai Gerindra	86	19	22.09%
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68	14	20.59%
Partai Demokrat	44	9	20.45%
Partai Golkar	102	20	19.61%
Partai Amanat Nasional (PAN)	48	9	18.75%
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	53	9	16.98%
Total	580	127	21.90%

Sumber: Cakra Wikara Indonesia, 2024

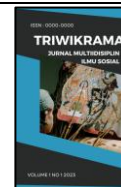
Tabel 2 menyajikan data konkret mengenai hasil akhir dari proses rekrutmen dan kompetisi elektoral. Data ini menunjukkan variasi yang signifikan antar partai, membuktikan bahwa faktor internal partai sangat menentukan. Partai NasDem menjadi satu-satunya partai yang capaiannya mendekati target 30%, sementara PKS berada di urutan terbawah. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana ideologi, kepemimpinan, dan budaya internal masing-masing partai memengaruhi komitmen mereka terhadap representasi perempuan secara substantif, bukan hanya formal. Fakta bahwa tidak ada satupun partai yang mencapai atau melampaui 30% menegaskan bahwa masalah ini bersifat sistemik di seluruh spektrum politik.

2) Politik Penempatan: Nomor Urut dan Posisi Strategis

Salah satu mekanisme struktural paling efektif yang digunakan partai untuk mengontrol hasil pemilu adalah penempatan caleg pada daftar suara. Seperti telah dibahas sebelumnya, nomor urut kecil (terutama nomor 1) memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan keterpilihan (Hasan & Ilyas, 2023). Partai politik, yang didominasi oleh elite laki-laki, cenderung memberikan nomor urut jadi ini kepada kader laki-laki senior, tokoh masyarakat laki-laki, atau mereka yang memiliki modal finansial besar.

Perempuan, terutama yang bukan berasal dari dinasti politik atau tidak memiliki sumber daya finansial yang kuat, sering kali ditempatkan di nomor urut bawah yang peluang menangnya jauh lebih kecil. Praktik ini merupakan bentuk diskriminasi struktural yang halus namun sangat efektif dalam menjaga dominasi laki-laki di parlemen. Kebijakan kuota 30% menjadi tidak bergigi ketika tidak diiringi dengan aturan penempatan yang adil, seperti sistem *resleting* (*zipper system*), di mana caleg laki-laki dan perempuan ditempatkan secara berselang-seling di daftar calon (Faiziyah, 2022).

3) Budaya Organisasi Partai dan Jaringan Informal



Partai politik di Indonesia sering kali beroperasi dengan budaya organisasi yang sangat maskulin. Proses pengambilan keputusan strategis, lobi politik, dan pembagian sumber daya sering kali tidak terjadi dalam forum-forum formal, melainkan dalam jaringan informal yang eksklusif (Setyowati & Haryono, 2022). Jaringan ini, yang sering disebut sebagai klub laki-laki (*boys club*), beroperasi di luar jam kerja formal, di tempat-tempat yang mungkin tidak nyaman bagi perempuan, dan menggunakan gaya komunikasi yang sangat maskulin.

Akibatnya, politisi perempuan sering kali terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan yang sesungguhnya. Mereka kehilangan akses terhadap informasi penting, dukungan politik dari para senior, dan bimbingan (mentorship) yang krusial untuk kemajuan karier (Wahyuni, 2022). Tanpa akses ke jaringan informal ini, kemampuan mereka untuk membangun basis kekuatan, memengaruhi kebijakan partai, dan pada akhirnya naik ke posisi kepemimpinan menjadi sangat terhambat.

PEMBAHASAN

Hambatan Struktural Eksternal: Arena Kompetisi yang Timpang

Selain hambatan internal, politisi perempuan juga harus menghadapi arena kompetisi eksternal yang secara struktural tidak adil dan penuh rintangan. Salah satu rintangan terbesar adalah akses terhadap pendanaan politik. Jaringan finansial dan para donatur besar, yang secara historis didominasi oleh laki-laki, cenderung lebih skeptis dan enggan berinvestasi pada kampanye kandidat perempuan, yang sering kali dianggap memiliki elektabilitas lebih rendah. Keterbatasan dana ini secara langsung menghambat kemampuan mereka untuk membangun mesin politik yang kuat dan menjangkau pemilih secara luas.

Selanjutnya, bias media menjadi tembok penghalang yang signifikan. Pemberitaan mengenai politisi perempuan sering kali tidak proporsional, lebih fokus pada penampilan, status perkawinan, atau kehidupan pribadi mereka ketimbang visi, program, dan kompetensi kebijakan. Standar ganda ini memaksa mereka untuk bekerja dua kali lebih keras untuk membuktikan kelayakan mereka, sementara politisi laki-laki dinilai berdasarkan prestasi dan gagasannya. Interaksi antara keterbatasan sumber daya finansial dan representasi media yang bias ini menciptakan sebuah arena kompetisi yang timpang, di mana perempuan harus berjuang melawan arus bahkan sebelum kontestasi politik sesungguhnya dimulai.

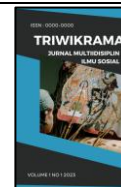
1) Politik Berbiaya Tinggi dan Kesenjangan Akses Finansial

Sistem pemilu di Indonesia dikenal memiliki biaya yang sangat tinggi dan bersifat transaksional (Westminster Foundation for Democracy, & WRI, 2025). Kampanye membutuhkan dana yang masif untuk alat peraga, operasional tim sukses, dan serangan fajar. Ini menjadi hambatan struktural yang sangat besar, terutama bagi perempuan, yang secara umum memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya finansial dibandingkan laki-laki (Usni, 2024). Seorang responden dalam studi WFD menggambarkan pemilu sebagai pertarungan dalam hal uang, di mana kandidat laki-laki seringkali berperan sebagai bulldoser yang dapat melibas upaya perempuan membangun basis suara dengan kekuatan finansial mereka (Westminster Foundation for Democracy, & WRI, 2025).

Kesenjangan ini diperburuk oleh ketiadaan kebijakan pendanaan afirmatif dari negara atau partai politik (Kamu Bersih Aku Pilih, 2023). Meskipun ada bantuan keuangan negara untuk partai politik, tidak ada aturan yang mewajibkan alokasi spesifik untuk mendukung kampanye kader perempuan. Akibatnya, perempuan harus berjuang dengan sumber daya yang minim, yang secara signifikan mengurangi daya saing mereka di lapangan.

2) Pembingkai Media (Media Framing) terhadap Politisi Perempuan

Media massa memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi publik, dan dalam banyak kasus, pemberitaan mengenai politisi perempuan cenderung bias dan merugikan.



Sebuah studi menemukan bahwa liputan media terhadap politisi perempuan bisa sangat negatif, dengan satu analisis menunjukkan persentase liputan negatif mencapai 87,7% (Hidayah & Suhardi, 2023).

Pembingkaiannya ini sering kali bersifat stereotipikal. Media lebih sering menyoroti aspek-aspek personal seperti penampilan, busana (*fashion*), status perkawinan, atau kehidupan keluarga, daripada gagasan, program kerja, atau kompetensi politik mereka (Hidayah & Suhardi, 2023). Perempuan juga sering kali dibingkai sebagai pelengkap, token, atau sekadar perpanjangan tangan dari dinasti politik keluarga mereka, bukan sebagai aktor politik yang independen dan otonom (Puspitosari & Nugroho, 2023). Framing semacam ini secara efektif mendelegitimasi kapasitas kepemimpinan perempuan di mata publik dan memperkuat stereotip kultural yang sudah ada (Dvana & Ahsan, 2021).

3) Kekerasan Politik Berbasis Gender (*Gender-Based Political Violence - VAW-P*)

Salah satu hambatan struktural yang paling mengkhawatirkan adalah tingginya tingkat kekerasan dan pelecehan yang ditujukan kepada perempuan dalam politik. Sebuah laporan komprehensif dari Westminster Foundation for Democracy (WFD) menemukan bahwa 88% perempuan yang aktif secara politik di Indonesia pernah mengalami kekerasan atau pelecehan yang berkaitan dengan aktivitas mereka (Westminster Foundation for Democracy, & WRI, 2025).

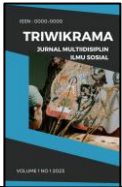
Kekerasan ini memiliki banyak bentuk, mulai dari kekerasan verbal yang meremehkan kompetensi (dialami oleh 51% responden), pelecehan seksual, intimidasi psikologis, hingga kekerasan simbolis seperti perusakan alat peraga kampanye (Westminster Foundation for Democracy, & WRI, 2025). Kekerasan ini menciptakan lingkungan politik yang tidak aman, beracun, dan penuh ancaman bagi perempuan. Dampaknya sangat serius: banyak perempuan menjadi enggan untuk tampil di ruang publik, takut menyuarakan pendapat, atau bahkan menarik diri sepenuhnya dari arena politik untuk melindungi diri dan keluarga mereka (Wahid & Tifu, 2023). VAW-P berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif untuk membungkam dan meminggirkan perempuan dari kekuasaan.

Interseksi Hambatan Kultural dan Struktural dalam Menciptakan Glass Ceiling

Glass ceiling yang menghalangi kepemimpinan politik perempuan bukanlah sekadar kumpulan hambatan yang berdiri sendiri. Ia adalah sebuah arsitektur penindasan yang kokoh karena adanya jalinan yang saling menguatkan antara faktor kultural dan struktural. Hambatan-hambatan ini tidak bersifat aditif, melainkan multiplikatif, di mana satu faktor memperburuk dampak dari faktor lainnya, menciptakan sebuah siklus yang sulit untuk dipatahkan.

Logika kausalitasnya dapat dilacak dengan jelas. Prosesnya dimulai dari fondasi kultural: ideologi patriarki yang mengakar di masyarakat menanamkan bias, baik secara sadar maupun tidak sadar, bahwa perempuan secara inheren kurang cocok untuk peran kepemimpinan publik (Usni, 2024). Bias kultural ini kemudian dioperasionalkan melalui mekanisme struktural di dalam partai politik. Elite partai, yang mayoritas adalah laki-laki dan produk dari budaya yang sama, menerjemahkan bias ini ke dalam keputusan-keputusan konkret. Mereka secara struktural menempatkan kandidat perempuan pada nomor urut yang tidak kompetitif (Hasan & Ilyas, 2023) dan menolak mengalokasikan sumber daya finansial yang memadai untuk kampanye mereka (Kamu Bersih Aku Pilih, 2023). Keputusan struktural ini sering kali dirasionalisasi dengan dalih kultural: pemilih belum siap atau kandidat perempuan kurang berani.

Lingkaran setan ini diperkuat lebih lanjut oleh faktor struktural eksternal. Arena politik yang sangat mahal secara sistematis menyaring kandidat yang tidak memiliki akses ke modal besar,

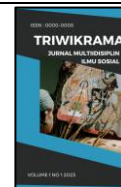


sebuah kondisi yang secara tidak proporsional memengaruhi perempuan karena posisi ekonomi mereka yang lebih lemah secara historis (Westminster Foundation for Democracy, & WRI, 2025). Media massa, sebagai institusi sosial lainnya, kemudian memperkuat siklus ini dengan membingkai politisi perempuan melalui lensa stereotipikal (Hidayah & Suhardi, 2023), yang pada gilirannya memvalidasi bias pemilih dan keputusan awal partai untuk tidak berinvestasi pada mereka. Ketika perempuan akhirnya gagal terpilih dalam jumlah yang signifikan, kegagalan tersebut salah diatribusikan pada kurangnya kualitas individu perempuan, bukan pada kegagalan sistemik dari struktur dan budaya yang menghambat mereka sejak awal.

Dengan demikian, kebijakan afirmasi seperti kuota 30% menjadi sebuah intervensi struktural yang dangkal. Ia memaksa partai untuk melakukan perubahan di permukaan yaitu, memasukkan nama perempuan ke dalam daftar calon tanpa menyentuh mesin kultural dan struktural yang sesungguhnya di bawahnya. Akibatnya, kebijakan ini secara tidak sengaja justru menciptakan budaya tokenisme. Partai belajar untuk mengakali aturan: memenuhi persyaratan hukum untuk menghindari sanksi, sambil tetap mempertahankan struktur kekuasaan maskulin yang ada. Kuota menjadi semacam pintu putar (*revolving door*), di mana perempuan masuk untuk memenuhi syarat administratif, namun segera didorong keluar oleh kekuatan sentrifugal dari budaya patriarki dan struktur yang tidak mendukung, memastikan dominasi laki-laki tetap utuh. Ini menunjukkan bahwa *glass ceiling* bukanlah masalah struktural yang bisa dipecahkan dengan solusi struktural semata, melainkan masalah sosio-struktural yang menuntut intervensi di kedua level secara simultan.

Tabel 3 Tipologi Hambatan Kultural dan Struktural terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan

Tipe Hambatan	Manifestasi Spesifik
Hambatan Kultural	1. Ideologi Patriarki & Peran Ganda: Penempatan perempuan di ranah domestik.
	2. Stereotip Gender: Dianggap emosional, lemah, tidak rasional.
	3. Persepsi Kompetensi Rendah: Kemampuan kepemimpinan diragukan.
	4. Resistensi Sosial & Bias Pemilih: Preferensi pada caleg laki-laki atau nomor urut atas.
Hambatan Struktural	Internal Partai Politik:
	1. <i>Rekrutmen & Kaderisasi Tokenistik</i> : Hanya untuk memenuhi kuota, tanpa dukungan.
	2. <i>Politik Penempatan Tidak Strategis</i> : Ditempatkan di nomor urut bawah.
	3. <i>Budaya Organisasi Maskulin</i> : Jaringan informal yang eksklusif dan kurangnya mentorship.



	Eksternal (Arena Kompetisi):
	4. <i>Politik Biaya Tinggi</i> : Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya finansial.
	5. <i>Pembingkai Media yang Bias</i> : Fokus pada penampilan, bukan substansi.
	6. <i>Kekerasan Politik Berbasis Gender (VAW-P)</i> : Intimidasi, pelecehan, dan kekerasan.

Sumber: Dikelola dari Berbagai Sumber oleh Penulis, 2025

SIMPULAN DAN SARAN

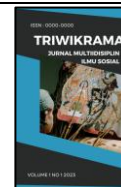
Simpulan

Berdasarkan analisis studi literatur yang komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *glass ceiling* yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi dalam partai politik di Indonesia bukanlah sebuah penghalang tunggal, melainkan sebuah sistem yang kompleks, berlapis, dan mampu mereproduksi dirinya sendiri. Sistem ini dibangun di atas fondasi interaksi yang dinamis dan toksik antara faktor-faktor kultural yang mengakar dan faktor-faktor struktural yang melembaga.

Secara langsung menjawab rumusan masalah, faktor-faktor tersebut menciptakan *glass ceiling* melalui mekanisme berikut:

- 1) Faktor Kultural: Budaya patriarki yang dominan secara fundamental mendelegitimasi kepemimpinan perempuan di ranah publik dengan mengkonstruksi stereotip gender yang merendahkan, meragukan kompetensi mereka, dan membebani mereka dengan peran ganda. Ini menciptakan lingkungan sosial yang tidak mendukung dan bias pemilih yang merugikan.
- 2) Faktor Struktural Internal Partai: Partai politik, sebagai cerminan dari budaya yang lebih luas, mengoperasionalkan bias kultural ini melalui struktur dan praktiknya. Rekrutmen dan kaderisasi seringkali bersifat tokenistik, dimana perempuan hanya dijadikan alat untuk memenuhi syarat administratif kuota. Mereka secara sistematis ditempatkan pada posisi yang tidak strategis (seperti nomor urut bawah) dan dikecualikan dari jaringan kekuasaan informal yang penting untuk kemajuan karir.
- 3) Faktor Struktural Eksternal: Arena kompetisi politik yang timpang semakin memperburuk keadaan. Politik berbiaya tinggi menjadi penghalang yang tidak proporsional bagi perempuan yang memiliki akses finansial lebih terbatas. Pembingkai media yang bias gender terus-menerus merusak citra dan kredibilitas politisi perempuan. Puncaknya, maraknya kekerasan politik berbasis gender menciptakan lingkungan yang penuh ancaman dan tidak aman, yang secara efektif membungkam dan meminggirkan perempuan dari politik.

Kesimpulan utamanya adalah bahwa intervensi struktural semata, seperti kebijakan kuota 30%, terbukti tidak cukup untuk membongkar *glass ceiling*. Tanpa adanya perubahan kultural yang mendasar dan mekanisme pendukung yang kuat di dalam partai, kebijakan tersebut justru dapat menjadi kontraproduktif dengan melanggengkan praktik tokenisme. *Glass ceiling* akan tetap kokoh selama partai politik dan masyarakat masih memandang kepemimpinan perempuan sebagai sebuah anomali, bukan sebagai sebuah keniscayaan dalam demokrasi yang sehat dan setara.

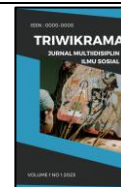


Saran

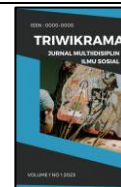
- a. Partai politik harus bergerak melampaui kepatuhan formal terhadap kuota. Ini berarti mengimplementasikan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang transparan, berbasis meritokrasi, dan berkeadilan gender. Secara konkret, partai harus mewajibkan penerapan sistem resleting (*zipper system*) dalam penyusunan daftar calon legislatif untuk memastikan penempatan perempuan di nomor urut strategis.
- b. Kampanye penyadaran publik yang masif diperlukan untuk menantang norma-norma patriarki dan stereotip gender di masyarakat. Lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat harus dilibatkan untuk mempromosikan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya hak, tetapi juga merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa dan kualitas demokrasi.
- c. Peraturan perundang-undangan harus diperkuat untuk melampaui kuota pencalonan. Pemerintah dan DPR perlu merevisi UU terkait untuk memasukkan skema pendanaan afirmatif dari negara. Skema ini dapat berupa pemberian insentif dana tambahan bagi partai yang berhasil meningkatkan keterpilihan perempuan secara signifikan, atau disinsentif (pemotongan dana bantuan) bagi partai yang kinerjanya buruk. Perlu juga diatur kewajiban bagi partai untuk mengalokasikan minimal 30% dari dana bantuan negara untuk kegiatan pemberdayaan politik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2014). *Tantangan-tantangan partai politik hati nurani rakyat dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan (Studi deskriptif tentang tantangan-tantangan DPC Partai Hanura Kota Surabaya dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada Pileg 2014)* [Skripsi, Universitas Airlangga]. UNAIR REPOSITORY. <https://repository.unair.ac.id/16646/>
- Cahyani, P. D., & Nugroho, C. (2023). Robert Entman's framing analysis: Female representation in 2024 presidential candidates on Republika.com and Sindonews.com. In *Proceedings of the 5th International Conference on Communication, Information, and Media (IC2IM 2023)* (hlm. 233-242). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_24
- Cakra Wikara Indonesia. (2024). *Keterwakilan perempuan di DPR RI hasil pemilu 2024*. <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2024/09/Keterwakilan-Perempuan-di-DPR-RI-2024-COMPRESSED.pdf>
- Dewi, I. R. (2014). Glass ceiling: Sebuah studi literatur. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(2), 169-178. Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jbs/article/view/17224>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY. (2023). *Glass ceiling: Tantangan perempuan untuk berpolitik*. <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/glass-ceiling-tantangan-perempuan-untuk-berpolitik>
- Dvana, A., & Ahsan, M. F. (2021). Representasi politisi perempuan dalam episode "Politik Perempuan" di program Mata Najwa Trans 7. *Jurnal Sipakalebby*, 5(1), 51-64. <https://doi.org/10.24252/jsipakalebby.v5i1.21208>
- Faoziyah, A. E. (2022). Dampak kuota gender dalam keterwakilan politik: Analisis kasus kuota 30% untuk perempuan di parlemen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 33-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7097486>
- Faoziyah, A. E. (2022). Perbandingan representasi perempuan di parlemen Indonesia dan Filipina. *Jurnal Governan*, 8(2). <https://doi.org/10.24905/governan.v8i2.155>
- Fitriani, D., & Sudaryono, S. (2023). Pengaruh glass ceiling terhadap kepemimpinan strategis wanita dalam bidang militer di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategi Keamanan Nasional*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v2i1.1039>



- Haryati, H., Saad, M., & Alwi, H. M. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik (Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). *POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 101-120. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/229>
- Hasan, M., & Ilyas. (2023). Analisis keterwakilan 30 persen perempuan pada Pemilu 2024 ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Reflektika*, 18(2), 179-190. <https://doi.org/10.24235/reflektika.v18i2.11952>
- Hidayah, N., & Suhardi. (2023). Perspektif media massa terhadap politisi perempuan dalam tiap rezim negara dalam perspektif pendidikan Islam. *Edification: Isalmic Educational Research Journal*, 5(2), 177-190. <https://doi.org/10.51878/ei.v5i2.2320>
- Kamu Bersih Aku Pilih. (2023). *Pendanaan politik untuk politisi perempuan*. <https://kamubersihakupilih.id/pendanaan-politik-untuk-politisi-perempuan/>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2022). *Urgensi meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI*. https://www.setneg.go.id/baca/index/urgensi_meningkatkan_keterwakilan_perempuan_di_dpr_ri
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). *Perempuan dalam Pemilu 2019, antara harapan dan kenyataan*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/perempuan-dalam-pemilu-2019-antara-harapan-dan-kenyataan>
- Lulu, M. A. (2022). Glass ceiling in the world of work (Burhani epistemology perspective). *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 220-235. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v9i2.7001>
- Maheshwari, M., & Lenka, U. (2022). An integrated conceptual framework of the glass ceiling effect. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*, 9(2), 296-321. <https://doi.org/10.1108/JOEPP-06-2020-0098>
- Makhbul, Z. K. M. (2019). Perlukah siling kaca?. Sinar Harian. <https://www.sinarharian.com.my/article/14443/siling-kaca>
- Manan, F., & Syafariah, D. (2021). Sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik di Indonesia masa reformasi. *Jurnal Kumawula*, 4(2), 123-134. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.36985>
- Oktafia, Y., Febriyanti, W., & Julia, V. (2022). Penyebab minimnya keterwakilan caleg perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung periode 2019-2024. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.33387/j.v3i1.3208>
- Primaresti, F. (2024). *Menilik representasi perempuan dalam Pemilu 2024*. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/11/INDONESIA-2024-Felia-Primaresti-Peneliti-Bidang-Politik-Menilik-Representasi-Perempuan-dalam-Pemilu-2024_web.pdf
- Puspitosari, H., & Nugroho, C. (2023). Political framing and woman's image in media coverage during the 2024 general election. In *Proceedings of the 5th International Conference on Communication, Information, and Media (IC2IM 2023)* (hlm. 225-232). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_23
- Putri, G. A., & Prahassacitta, V. (2020). Partisipasi dan komunikasi politik perempuan di legislatif menurut kacamata politisi perempuan di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 163-176. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.163-176>



- Rastati, R. (2017). Kebijakan affirmative action: Partisipasi dan tantangan perempuan dalam pemilu. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 43(2), 191-205. <https://doi.org/10.14203/jmi.v43i2.866>
- Rastati, R. (2017). Kebijakan affirmative action: Partisipasi dan tantangan perempuan dalam pemilu. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 43(2), 191-205. <https://doi.org/10.14203/jmi.v43i2.866>
- Setyowati, D. E., & Haryono, B. S. (2022). Implementasi kebijakan keterwakilan 30% perempuan dalam partai politik di DPC PDI Perjuangan dan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 14(2), 101-115. <https://doi.org/10.47548/governance.v14i2.473>
- Shakinah, G., & Sumampouw, N. G. (2023). Identifikasi faktor glass ceiling pada perempuan pendeta. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 18(2), 148-163. <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.24237>
- Stiftung, K.A. (2024). *Penguatan peran, kapasitas dan kompetensi anggota parlemen perempuan periode 2024-2029*. <https://www.kas.de/in/web/indonesien/veranstaltungen/detail/-/content/strengthening-the-role-capacity-and-competence-of-women-parliamentarians-for-the-period-2024-2029-1>
- TVR Parlemen. (2024). *Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029 capai 21,9 persen*. <https://tvrparlemen.dpr.go.id/audio/keterwakilan-perempuan-di-dpr-ri-periode-2024-2029-capai-219-persen/>
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi perempuan di parlemen hasil Pemilu 2019. *Jurnal Kajian*, 24(2), 151-169. <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1886>
- UN Women. (2025). *Facts and figures: Women's leadership and political participation*. <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-womens-leadership-and-political-participation>
- UN Women. (2025). *Women in politics: 2025*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/03/women-in-politics-map-2025>
- Usni. (2024). *Tantangan perempuan dalam arus politik perempuan Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>
- Wahid, L. O. A., & Tifu, L. (2023). Hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(5), 2486-2492. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i05.1540>
- Wahyuni, S. (2013). *Fenomena glass ceiling pada karyawan wanita di sektor perbankan (Studi pada karyawan wanita di Bank Jatim Cabang Malang)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang]. Eprints UMM. <https://eprints.umm.ac.id/8315/>
- Wahyuni, S. (2022). Glass ceiling dalam peningkatan jenjang karir pegawai negeri sipil perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Medan. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 123-131. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.41326>
- Westminster Foundation for Democracy, & WRI. (2025). *Kekerasan terhadap perempuan pada Pemilu Indonesia 2024*. https://www.wfd.org/sites/default/files/2025-02/2024_indonesia_vawe_report_wri_x_wfd_for_publication.pdf